BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun seksual, telah menjadi fenomena yang cukup membuat khawatir dalam masyarakat modern. Kekerasan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan sosial yang buruk, permasalahan dalam keluarga, serta kurangnya pengawasan dan bimbingan yang memadai dalam pendidikan.¹ Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas ini adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap santri di pondok pesantren hingga mengakibatkan kematian, sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua pihak yang masih di bawah umur, yaitu pelaku dan korban, di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan moral dan karakter. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan mendidik. Namun, kenyataannya, tindak kekerasan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pembinaan moral di lingkungan pesantren.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 November 2023 di pondok pesantren Raudhatul Mujawwidin, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo, Jambi. Kejadian ini berawal dari seorang santri yang mendapati kekerasan oleh pelaku 1 dan pelaku 2, santri seniornya di lantai 3 asrama an-Nawawi. Usut demi usut hal itu terjadi karena pelaku kesal sebab korban terus menerus menagih hutangnya kepada pelaku 1. Beberapa hari sebelum kejadian pelaku 1 pernah memukuli anak korban karena dengan alasan yang sama, namun mereka berhasil di pisahkan oleh temannya. Karena pelaku 1 belum merasa puas melampiaskan

¹ Edy Kurniawansyah dan Dahlan, “Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa)”, *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 2 September 2021, h. 32

kekesalannya, maka pelaku 1 kembali melakukan kekerasan kepada korban dengan mengajak teman nya untuk membantu melakukan hal keji tersebut.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan Bangsa ini. Mereka merupakan individu yang sedang dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, baik yang masih hidup, maupun yang masih dalam kandungan.² Pada tahap usia ini, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman atau perlakuan yang dapat merugikan tumbuh kembangnya. Sebagai makhluk sosial, anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dari keluarga, masyarakat, serta negara, agar dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat.³ Namun, di sisi lain, perkembangan anak tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kondisi tersebut, termasuk lingkungan keluarga yang tidak mendukung, pengaruh negatif dari teman sebaya, ataupun peran media yang seringkali tidak memberikan contoh yang baik bagi anak. Salah satu masalah yang semakin memprihatinkan adalah kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak atau bahkan orang dewasa, yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah, masyarakat, dan bahkan di lembaga pendidikan Agama seperti pondok pesantren.

Kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu isu sosial yang terus menjadi perhatian, baik secara global maupun nasional. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan, justru terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan moral. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 15 (a) menyatakan bahwa: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

² Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³ Nurjannah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Meninggal dunia”, *Jurnal Of Education, humaniora and Sosial Sciences*, Vol. 6, No. 3, 2024, h. 1214

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.⁴

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵

Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang berkaitan dengan moralitas, dan tanggung jawab masyarakat terhadap generasi muda. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali menjadi cerminan dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pola pendidikan yang kurang efektif, atau pengaruh negatif dari media dan teman sebaya.⁶

Di Indonesia, kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terus meningkat seiring dengan perubahan pola kehidupan masyarakat. Menurut data dari KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari 3.401 kasus pada 2019 menjadi 4.410 kasus pada 2023.⁷ Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anak. Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), faktor penyebab kekerasan ini meliputi masalah psikologis, ekonomi keluarga, hingga lingkungan sosial yang buruk.

Secara hukum, anak yang terlibat dalam masalah hukum itu diberikan perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini dirancang untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan proses hukum. Tujuannya adalah agar anak-anak tersebut memiliki peluang untuk

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Nyoman Wiraadi T. A, dan Komang Suwarni A., “Dampak Kekerasan Pada Anak”, *Journal Psikologi Mandala*, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 71

⁷ Anita Permata Dewi, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) “Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia”*, 2024.

meraih masa depan yang lebih baik melalui pembinaan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa serta negara.⁸ Prinsip utama dalam undang-undang ini adalah keadilan restoratif, di mana penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif. Namun, kenyataannya pendekatan ini sering kali menemui tantangan, terutama ketika tindak pidana yang dilakukan anak berdampak besar, seperti hilangnya nyawa seseorang. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya rehabilitasi, implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Putusan No. 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt tentang tindak pidana kekerasan oleh anak yang mengakibatkan kematian, menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku 1 yaitu penjara 7 tahun 6 bulan, dan pelaku 2 yaitu penjara 6 tahun 6 bulan. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut: “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa kasus ini termasuk tindak pidana kekerasan atau penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351. Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sebagai berikut: “Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.¹⁰

Pondok pesantren yaitu sebagai lembaga pendidikan yang berfokus dalam pembentukan karakter dan pengajaran agama, seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para santri. Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa pondok pesantren pun tidak terlepas dari permasalahan kekerasan, baik yang dilakukan

⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2005, h. 55

⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukuim Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 125

oleh sesama santri atau bahkan oleh pengurus pesantren. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap sesama anak di pondok pesantren menjadi sorotan, karena menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pembinaan moral di lembaga pendidikan Agama ini. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt, yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian seorang santri.

Hukum pidana Islam memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam prinsip hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak dibebani tanggung jawab pidana, baik dalam bentuk hukuman *hudud*, *qishash*/diyat, maupun *ta'zir*. Tanggung jawab atas perbuatan anak tersebut dialihkan kepada orang tua, karena orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi pribadi yang baik. Jika seorang anak melakukan kejahatan, hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi dari kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu orang tua dapat dikenai sanksi atas kelalaian tersebut.¹¹

Kekerasan yang dilakukan hingga mengakibatkan kematian Dalam hukum Islam itu dikenakan dengan balasan *qishash*, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab

¹¹ Adam sani, dkk. “Pemidaan Anak Menurut Konsepsi hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, h. 12

yang sangat pedih. (179) Dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”¹²

Perspektif hukum pidana Islam menempatkan anak pada posisi hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hukum Islam menekankan pentingnya usia baligh, kedewasaan akal, dan niat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Anak yang belum mencapai usia baligh dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kasus yang melibatkan kekerasan berat seperti ini, hukum Islam memberikan alternatif penyelesaian berupa mekanisme diyat (ganti rugi) atau pemberian maaf oleh keluarga korban. Pendekatan ini mencerminkan sifat hukum Islam yang menitikberatkan pada keadilan restoratif dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat.¹³ Anak-anak yang berusia antara Sembilan hingga sepuluh tahun disebut sebagai *tamyiz*. *Tamyiz* merujuk pada kondisi anak-anak yang belum memiliki akal yang sempurna seperti orang dewasa, namun sudah mampu berfikir dan membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Dalam hukum pidana Islam, jika anak yang *tamyiz* melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban terluka atau bahkan meninggal dunia, mereka dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* seperti diyat, *kaffarah*, atau hukuman alternatif lain yang bertujuan untuk mendidik. Namun, jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, mereka akan dikenakan hukuman *hudud* atau *qishash*.¹⁴

Kasus ini juga mengungkap tantangan dalam penerapan hukum positif di Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan nilai-nilai Agama. Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat upaya untuk melindungi pelaku dari dampak buruk hukuman berat, seperti pemenjaraan. Namun, di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya pula. Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt menjadi refleksi dari upaya sistem hukum positif untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap pelaku anak dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

¹² Fadlurrahman, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 21

¹³ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024), h. 1

¹⁴ Shanty Hermalia Putri, dan Zulkarnain, “Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 2024, h. 1683

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “**TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa terdapat tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur dan mengakibatkan kematian terhadap sesama anak, yang terjadi di lingkungan Pendidikan yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Jambi. Dalam putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt dijelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku yaitu penjara 7 tahun 6 bulan, dan 6 tahun 6 bulan. Dalam Hukum Pidana Islam seorang anak yang melakukan tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan kematian ini dihukum *ta'zir* seperti *diyat*, *kaffarah*, atau hukuman alternatif lainnya yang memiliki tujuan mendidik. Berdasarkan masalah penelitian tersebut, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan keringanan hukum hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt tentang tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana unsur-unsur sanksi tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektifitas sanksi tindak pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt tentang tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan keringanan hukum hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt tentang tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur sanksi tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui efektifitas sanksi tindak pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt tentang tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan kajian akademis terkait hukum pidana anak, terutama dalam perspektif hukum pidana Islam, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan kekerasan di lingkungan Pendidikan yang berbasis agama seperti pondok pesantren, menjadi referensi untuk pengembangan sistem peradilan anak di Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengambilan keputusan hakim.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan dalam kasus kekerasan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian, dengan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif, sesuai dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dan hukum positif. Adanya penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan, dan Pendidikan anak, terutama dalam lingkungan pesantren, untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Mengingat kasus ini terjadi di lingkungan pondok pesantren maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif terkait pentingnya pengawasan, pembinaan moral, dan Pendidikan karakter dalam lingkungan pondok pesantren untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan antar santri.

E. Kerangka Berfikir

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat didefinisikan baik secara yuridis maupun kriminologis. Secara yuridis normatif, kejahatan adalah perbuatan yang tercantum secara *in abstracto* dalam aturan hukum pidana.¹⁵ Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang kepada seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.¹⁶ Apabila dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP, Ketika menjatuhkan sanksi terhadap seseorang maka harus melihat dulu apakah perlakuan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hukum atau tindak pidana yang melanggar regulasi. Perihal ini kejahatan terutama kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dan harus dikenakan sanksi sebagaimana dalam teori pemidanaan.¹⁷

Perspektif yuridis tidak secara eksplisit mengenal istilah kejahatan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Pasal 89 KUHP dalam Bab IX menyatakan bahwa tindakan yang menyebabkan seseorang pingsan atau tidak berdaya dapat disamakan dengan penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban tidak berdaya atau kehilangan kesadaran.¹⁸ Kekerasan terhadap anak, yang meliputi tindakan kekerasan, penelantaran, mencakup semua bentuk perlakuan yang menyebabkan

¹⁵ Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty: Yogyakarta). 1999, h. 10

¹⁶ Ismu Gunadi dan jonaedi efendi, *Hukum Pidana*, (Kencana: Jakarta), 2014, h. 35

¹⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: As-Syamil), 2001, h. 132

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada utama, 2017), h. 123

penderitaan fisik atau emosional, pelecehan seksual, pengabaian, eksploitasi komersial, atau bentuk eksploitasi lainnya. Tindakan ini dapat mengakibatkan cedera atau dampak negatif, baik secara nyata maupun potensial, terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak. Biasanya, kekerasan ini terjadi dalam hubungan yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak mencakup diskriminasi, eksploitasi fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan tidak pantas lainnya.¹⁹

Tindak kekerasan mencakup semua perbuatan yang melanggar hukum, berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau bagian tubuh manusia. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal. Selain itu, istilah kekerasan juga memiliki makna kecenderungan agresif yang mengarah pada perilaku merusak, menimbulkan penderitaan, atau menyakiti orang lain.²⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, kekerasan terhadap anak dapat disimpulkan sebagai segala bentuk perlakuan, baik fisik maupun psikis, yang menyebabkan penderitaan pada anak. Saat ini, pelanggaran terhadap hak-hak anak semakin tidak terkendali, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan serta penderitaan yang dialami anak-anak belum sepenuhnya berakhir. Kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual, tetap menjadi kenyataan yang tidak lagi tersembunyi. Oleh karena itu, tidak tepat jika kekerasan terhadap anak ini dianggap sebagai urusan pribadi atau masalah internal keluarga yang tidak memerlukan campur tangan masyarakat.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan definisi khusus mengenai tindak pidana anak. Fokusnya lebih pada pengaturan sistem

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Fransiska Novita Eleanora, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021) h. 49

peradilan pidana anak secara keseluruhan, bukan pada pengertian tindak pidana anak itu sendiri. Namun, anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, sebagai berikut :²¹

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum ialah anak yang terlibat dalam konflik hukum, menjadi korban tindak pidana, atau bertindak sebagai saksi dalam tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang berusia antara 12 (dua belas) hingga kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Hakim Zulfikar Siregar, salah satu Hakim yang menangani perkara anak, berpendapat bahwa tindak pidana anak mencakup kejahatan pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Menurut beliau, hingga saat ini, definisi khusus mengenai tindak pidana anak belum secara eksplisit diatur di Indonesia. Namun, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian tersebut dijelaskan dari segi filosofis, yaitu anak yang berada dalam situasi berhadapan dengan hukum atau berada dalam proses peradilan pidana.

Hukum pidana Islam memandang konsep anak di bawah umur berkaitan dengan istilah *mumayyiz* dan *ghayr mumayyiz* dalam fiqh Islam, serta usia baligh sebagai penentu tanggung jawab pidana. Anak yang belum *baligh* itu tidak dikenakan hukuman pidana penuh karena dianggap belum memiliki akal yang sempurna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanda baligh dalam Islam ini didasarkan pada tanda biologis, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, atau jika belum mengalami tanda-tanda tersebut, maka ditetapkan pada usia 15 tahun.²² Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum baligh, maka ia tidak dikenakan *qishash* atau *hudud*, tetapi bisa dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik seperti nasihat, peringatan, atau hukuman ringan yang ditetapkan oleh Hakim. Hal ini sesuai dengan hadis

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Zul Anwar Ajim Harahap, dkk. *Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), h. 81

Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pencatatan dosa baru berlaku bagi seseorang setelah ia baligh, berakal, dan sadar atas perbuatannya. Namun, jika seorang anak telah baligh tetapi belum dewasa secara mental, maka tanggung jawabnya tetap dapat dikurangi sesuai dengan kebijakan hakim dalam hukum Islam.²³

Hukum positif Indonesia mengatur batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam konteks pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.²⁴ Jika seorang anak melakukan tindak pidana, maka hukumannya berbeda dengan orang dewasa karena hukum positif menerapkan pendekatan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke luar sistem peradilan, seperti mediasi atau pembinaan sosial. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dituntut pidana dan hanya dapat dikenakan tindakan seperti rehabilitasi atau pembinaan sosial. Sedangkan anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi dengan pidana yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa, seperti pidana penjara maksimal setengah dari hukuman dewasa atau tindakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).²⁵

Hukum Pidana Islam atau biasa disebut sebagai *jinayah* menjelaskan mengenai *jarimah* atau tindak pidana. *Jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Syariat, di mana pelakunya dikenakan ancaman hukuman seperti *had* atau *ta'zir*.²⁶ Seseorang dianggap melakukan tindak pidana jika terbukti melanggar ketentuan Syariat. Dalam perspektif Islam, *jarimah* merujuk pada tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman *hudud*,

²³ Wahid, Sebab Amalan Tidak Tercatat, *daaruttauhid.org*, 2021

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), h. 43

²⁶ Alfian Muaidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qanum*, Vol. 20, No. 1, Surabaya (2017), h. 185

qishash, atau *ta'zir*. Larangan tersebut dapat berupa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan maupun kewajiban yang ditinggalkan. Istilah syariat dalam pengertian ini menegaskan bahwa suatu tindakan baru dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilarang oleh ketentuan Syariat.²⁷ Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum mencakup unsur formil, materil, dan moril. Unsur formil berkaitan dengan aturan hukum yang dilanggar, unsur materil berhubungan dengan akibat nyata dari perbuatan tersebut, dan unsur moril berkaitan dengan kesengajaan atau kelalaian pelaku. Sementara itu, unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu. Jumlah dan jenis unsur khusus ini bervariasi, tergantung pada perbedaan karakteristik dari masing-masing *jarimah*.²⁸ Adapun yang termasuk unsur-unsur *jarimah* di antaranya:

1. Unsur formil dalam tindak pidana mengacu pada keberadaan undang-undang atau *nash* yang mengatur suatu perbuatan. Artinya, suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali jika telah diatur oleh undang-undang atau *nash* yang berlaku. Dalam hukum positif, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas. Dalam Syariat Islam, asas legalitas juga diakui, yang tercermin dalam kaidah *laa jarimata wa laa 'uqubata illa bi nashin*, لَا جُرَيْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَاصٍ yang berarti "tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya *nash*".
2. Unsur materil yaitu sifat melawan hukum, artinya adanya tindak perbuatan seorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat
3. Unsur moral yaitu pelakunya Mukallaf, artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* perbuatan yang dilakukannya dan orang yang melakukan tindak pidana itu dapat

²⁷ Sandy Alun Samudra, dkk. "Tinjauan *Jarimah Qishash-Diyat* Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 1 No. 2, 2023

²⁸ Alfian Muaidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Surabaya (2017), h. 185

dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.²⁹

Pelaku *jarimah* dilihat dari aspek hukumannya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, hukuman *hudud/had*, hukuman *qishash* dan *diyat*, dan hukuman *ta'zir*.³⁰

Hukum pidana Islam mengkategorikan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagai *jarimah qishash-diyat*, yaitu kejahatan dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hukuman bagi pelaku bergantung pada niat dan cara perbuatannya. Adapun macam-macam dari pembunuhan sebagai berikut:

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja (*qathlul amdi*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh atau pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu, atau batu besar, atau melukai orang lain yang menyebabkan kematian.³¹ Hukuman utama bagi pembunuhan jenis ini adalah *qishash*, yaitu hukuman mati sebagai bentuk balasan setimpal, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ عَدَىٰ بِذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah

²⁹ Sahid, *Epistimologi hukum Pidana Islam (Dasar Dasar Fiqh Jinayah)*, (Pustaka Idea: Surabaya), 2015, h. 119

³⁰ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah dalam Fiqh Jinayah*, (Surabaya: CV Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021), h. 3

³¹ Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Nurani*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, h. 3

mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”³²

Keluarga korban yang memaafkan pelaku memungkinkan hukuman *qishash* diganti dengan *diyat*, yaitu pembayaran ganti rugi sebesar 100 ekor unta atau emas yang setara. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*, seperti hukuman cambuk atau penjara apabila diperlukan.³³

2. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhul 'amd*) adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun dalam perbuatan tersebut menyebabkan kematian korban pemukulan. Menurut Imam Syafi'i, pembunuhan semi sengaja merupakan pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya akan tetapi keliru dalam pembunuhannya (*maa kaana amdan fil fi khath qathil*). Dalam perbuatan tersebut ada dua unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Dalam kasus ini, pelaku tidak dijatuhi hukuman *qishash*, tetapi harus membayar *diyat* kepada keluarga korban.³⁴ *Diyat* ini tetap sebesar 100 ekor unta, tetapi dengan kualitas yang berbeda dari *qatl 'amd*, dan pembayarannya dapat dilakukan oleh *'aqilah* (keluarga besar pelaku) dalam waktu tiga tahun. Selain itu, pelaku juga diwajibkan membayar *kafarat*, yaitu membebaskan seorang budak atau jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

3. Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan tidak di sengaja (*qathlu al-khata'*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan

³² Fadlurrahman, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 21

³³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 277

³⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, ..., h. 279

orang lain meninggal dunia. *Jarimah* ini merupakan kebalikan dari pembunuhan disengaja. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidak sengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama.³⁵ Hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah atau tidak sengaja yaitu pidana pokok bagi *diyat* dan *kafarat*, alternatif hukumannya adalah *ta'zir* dan puasa, ada tambahan hukuman yaitu pencabutan hak waris dan pencabutan hak wasiat dan hak untuk mendapatkan wasiat.

Berdasarkan 3 jenis pembunuhan yang telah disebutkan diatas, ada 2 macam hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokok berupa *qishash* dan *diyat*, hukuman pengganti berupa *kafarat* dan *ta'zir*.

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan secara tetap oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukuman ini disebut *had*, yang secara harfiah berarti batas atau pemisah. Tujuan dari hukuman *had* adalah untuk menjaga hal-hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, seperti Agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal.³⁶ Dalam terminologi, Al-Jurjani mendefinisikan *qishash* sebagai pemberian sanksi hukum kepada pelaku, dan hukumannya setara dengan tindakan yang dilakukannya terhadap korban. Sementara itu, menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, *qishash* diartikan sebagai pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana yang sama persis dengan perbuatannya terhadap korban. Berdasarkan tafsiran al-Qur'an *qishash* ialah mengambil pembalasan yang setimpal.³⁷

Diyat merupakan harta yang harus ditunaikan disebabkan tindak kejahatan dan diserahkan kepada pihak korban atau walinya. Dalam kamus bahasa Indonesia *diyat* berarti denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai

³⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., h. 280

³⁶ Rahmi Damayati, dkk. "Penjelasan kejahatan Hudud dan Sanksi-Sanksinya dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam", *Jurnal penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, 2024, h. 388

³⁷ Sandy Alun Samudra, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Surabaya (2017), h. 212

atau membunuh orang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal, dan *diyat* ini merupakan hukuman pengganti *qishash*, yaitu pembayaran denda oleh pelaku kepada korban yang telah memaafkannya.³⁸

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, sehingga penetapannya diserahkan kepada pemerintah atau *waliyul amri* melalui proses ijtihad. Menurut Abd al-Qadir Audah, prinsip utama hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam adalah tidak bertujuan untuk membinasakan pelaku, melainkan sebagai bentuk pendidikan atau pengajaran (*ta'dib*).³⁹ Penentuan hukuman *ta'zir* sepenuhnya menjadi wewenang *waliyul amri*, dengan mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai moral masyarakat. Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, tujuan pembinaan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, celaan, ancaman, *tasyhir*, atau denda.⁴⁰ Dengan demikian, *jarimah ta'zir* dapat disimpulkan sebagai perbuatan maksiat yang merugikan, mengganggu ketertiban umum, di mana Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran, karena tidak adanya ketentuan Syariat yang spesifik dalam kasus tersebut.⁴¹ Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas hukuman *ta'zir* dalam menangani berbagai jenis pelanggaran sesuai dengan tingkat keparahan dan dampaknya.⁴²

Selain dari penjelasan di atas, Adapun teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu teori:

1. Teori Rehabilitasi

³⁸ Muhammad Ihsan, "Diyat Sebagai Pengganti *Qishash* Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan", *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 84

³⁹ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal tahqiqqa*, Vol. 17, No. 2, 2023, h. 38

⁴⁰ Vichi Novalia, dkk. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2024, h. 226

⁴¹ Ahmad syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" ..., h. 45

⁴² Ahmad syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" ..., h. 45

Teori Rehabilitasi merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada perbaikan dan perubahan perilaku pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik. Dalam teori ini, hukuman tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memberikan efek jera, tetapi sebagai sarana untuk membantu pelaku memahami kesalahannya dan memperbaiki diri. Teori ini sering diterapkan melalui program-program seperti pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, terapi perilaku, atau bahkan penanganan medis bagi pelaku dengan gangguan mental atau kecanduan.⁴³ Pendekatan rehabilitatif sangat penting untuk kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak atau pelaku yang berada dalam kondisi sosial atau ekonomi yang rentan. Dengan memberikan pelaku kesempatan untuk berkembang, teori rehabilitasi bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan (*recidivism*) dan menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat. Akan tetapi, penerapan teori ini membutuhkan sistem yang mendukung, seperti fasilitas rehabilitasi yang memadai, tenaga ahli yang kompeten, serta anggaran yang cukup. Selain itu, teori rehabilitasi seringkali dikritik karena dianggap mengabaikan kebutuhan korban dan masyarakat akan keadilan retributif. Meski demikian, teori ini dianggap sangat relevan dalam sistem peradilan pidana modern yang menempatkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pengembangan individu sebagai tujuan utama.

2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāshid al-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai dan sasaran-sasaran dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'at*, yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat *Syari'at*) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum *syara'*. Terdapat lima kepentingan yang harus dilindungi dalam

⁴³ Nur Kemala Putri, dkk., "Pengaruh Teori rehabilitasi Terhadap Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, Juni 2022, h. 212

teori *maqashid al-syari'ah* yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ini termasuk masalahat yang mu'tabar karena memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an. Dalam penelitian ini menggunakan teori *maqasid syari'ah hifdz al-Nafs* yaitu memelihara jiwa sebagai alasan pengharaman membunuh.⁴⁴ *Jarimah qishash diyat* merupakan suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishash* (serupa semisal) atau hukum *diyat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya). Kejahatan yang masuk golongan *qishash-diyat* ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam *jarimah qishash-diyat* ini yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan, penganiayaan dengan sengaja; dan menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian atau indikasi plagiat, sekaligus memperluas pemahaman terkait penelitian yang dilakukan, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi peneliti. Penelitian terdahulu ini dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki orisinalitas dan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang yang diteliti. Hal ini juga membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan penelitian sehingga mampu menyusun kajian yang lebih terarah dan inovatif. Selain itu adanya penelitian terdahulu untuk membuktikan bahwa tidak ada plagiarisme yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya:

1. Skripsi Febriana Suci Wulandari (2019) Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri

⁴⁴ Marsa'id, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noer Fikri, 2015), h. 209

Mojokerto Nomor 45/Pid.sus/2014/PN.Mkt).⁴⁵ Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian peneliti lebih fokus kepada analisis terhadap sistem peradilan pidana anak, termasuk peran Hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan bagaimana hukum pidana Islam berperan dalam menentukan keadilan untuk pelaku anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam penelitian terdahulu lebih fokus kepada sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus kekerasan oleh anak, serta bagaimana hukum pidana Islam mengatur sanksi tersebut, seperti penerapan *qhisash* atau *diyat*.

2. Skripsi Tasya Pratiwi Siregar Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 5/pid.sus-Anak/2022/PN.Mdn).⁴⁶ Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu lebih mendalam mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada anak pelaku penganiayaan berat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengkaji tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, yang mengakibatkan kematian dan sama-sama menggunakan pendekatan hukum pidana anak. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak, yang menyebabkan kematian. Sedangkan penelitian peneliti itu lebih umum dalam membahas tindak pidana kekerasan oleh anak, tanpa merinci jenis kekerasan yang dilakukannya.
3. Skripsi Tamara Natasya Lubis Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Bawah umur Yang Menyebabkan Kematian dalam

⁴⁵ Febriana suci wulandari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.sus/2014/PN.Mkt)”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2019)

⁴⁶ Tasya Pratiwi Siregar, “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 5/pid.sus-Anak/2022/PN.Mdn)”, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2023)

Perspektif Kriminologi (Studi Putusan: No. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts).⁴⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama mengkaji mengenai tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian oleh anak di bawah umur. Dan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu penelitian terdahulu berfokus pada perspektif kriminologi dan mengkaji putusan pengadilan anak No. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dan mengkaji putusan Pengadilan anak (Putusan Nomor 20/Pid.sus- Anak/2024/PN.Mrt).

4. Skripsi Anang yuda Kurniawan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 9/pid.sus Anak/2021/PN Clp).⁴⁸ Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai kasus dimana anak dibawah umur bertindak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan juga menggunakan pendekatan hukum pidana Islam. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu penelitian terdahulu menekankan kepada konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, seperti bagaimana anak yang belum mencapai usia baligh dipandang dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian peneliti lebih banyak membahas bagaimana putusan hakim dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan Hukum Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Skripsi Reta Tri Yulia Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana kekerasan bersama Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor perkara 15/Pid.sus/Anak

⁴⁷ Tamara Natasya Lubis,a “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Bawah umur Yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan: No. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts)”, (Skripsi: Universitas Sumatra Utara, 2024)

⁴⁸ Anang Yuda Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 9/pid.sus Anak/2021/PN Clp)”, (Skripsi: Uin Raden Mas Said Surakarta, 2022),

/2022/PN.Jmr).⁴⁹ Persamaannya terletak pada fokus keduanya yang mengkaji tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu penelitian terdahulu terfokus pada penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan bersama. Sedangkan penelitian peneliti lebih menyoroti analisis tindak pidana kekerasan oleh anak dari sudut pandang hukum Islam, tanpa terlalu memusatkan perhatian pada aspek kekerasan kolektif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dalam pembahasan dengan judul yang akan peneliti teliti. Oleh karena itu, tidak ada kasus plagiarisme atau penelitian berlebihan yang dilakukan. Adapun topik utama yang akan di bahas dalam penelitian peneliti yaitu pertimbangan keringanan hukum Hakim dalam mengambil keputusan pada putusan pengadilan negeri anak nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt, unsur-unsur dan sanksi tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan efektifitas penjatuhan hukuman dalam putusan nomor 20/Pid.sus-Anak/2024/PN.Mrt tersebut.

⁴⁹ Reta Tri Yulia, "Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana kekerasan bersama Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor perkara 15/Pid.sus/Anak /2022/PN.Jmr)", (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)